

## **Analisis Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap PDRB Perkapita Kota Banjarmasin**

**Hamiddah Lianita\*, Yunita Sopiana**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

\*[hamidahlianita74@gmail.com](mailto:hamidahlianita74@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the ratio of regional financial capacity and the ratio of regional financial independence and their influence on GRDP per capita in Banjarmasin City. The data used in this study is secondary data consisting of data from the APBD and GDRP per capita of Banjarmasin City in 2010-2019. The analytical technique used is quantitative analysis by measuring the ratio and multiple linear regression. Analyzed using Eviews version 10 program.*

*The results obtained from this study indicate that the regional financial capacity in Banjarmasin City in 2010-2019 is in the "moderate" category while regional financial independence in Banjarmasin City in 2010-2019 is included in the category of "adequate" relationship patterns. Regional financial capacity has a positive and significant impact on GDRP Percapita. Regional financial independence has a positive but not significant effect on GDRP per capita. Simultaneously, regional financial capability and independence have a positive and significant impact on GDRP Percapita.*

**Keywords:** *Regional Finance; Regional Financial Capability; Regional Financial Independence; Economic Growth; GDRP Per Capita*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap PDRB Perkapita di Kota Banjarmasin. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data APBD dan PDRB perkapita Kota Banjarmasin tahun 2010-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu dengan mengukur rasio dan regresi linier berganda. Dianalisis dengan Eviews versi 10.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kemampuan keuangan daerah di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 berada di kategori "sedang" sedangkan kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 termasuk ke dalam golongan pola hubungan "cukup". Kemampuan keuangan daerah berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap PDRB Perkapita. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh (positif) tetapi tidak signifikan terhadap PDRB Perkapita. Secara simultan, kemampuan dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap PDRB Perkapita.

**Kata Kunci:** Keuangan Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Perkapita.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia mempraktikkan sistem desentralisasi yang dicerminkan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu sebagai tanggung jawab yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar mengatur segala aspek urusan daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan berpatokan dengan peraturan daerahnya yang berlaku. Selain itu, otonomi daerah juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mengurangi

ketergantungan dengan pemerintah pusat terutama dalam hal masalah keuangan, agar pemerintah daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam hal membiayai daerahnya sendiri. Otonomi fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal merupakan gambaran apakah pemerintah daerah mampu tidaknya dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Salah satu indikator untuk melihat apakah otonomi daerah berhasil atau tidak yaitu dengan mengetahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah tersebut. Daerah otonom diharapkan mampu dan mandiri dalam membiayai atau melaksanakan pengeluaran rutinnya. Melalui keuangan daerah yang efektif maka otonomi daerah bisa diwujudkan.

Melalui PAD daerah tersebut bisa terlihat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besarnya partisipasi PAD terhadap APBD, hal itu merupakan gambaran ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat kecil. Berikut komposisi PAD Kota Banjarmasin :

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah/Total (Rp)
1	Pajak Daerah	215.643.985.952,70
2	Retribusi Daerah	34.307.011.439,00
3	Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	21.883.513.529,00
4	Lain lain PAD yang sah	58.745.288.616,34
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>330.579.799.537,04</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin*

Berdasarkan tabel diatas realisasi PAD Kota Banjarmasin didominasi oleh Pajak Daerah, kemudian Lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah dan yang terakhir yaitu pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Tanggung jawab pemerintah daerah atas tugas ke pemerintahannya bisa dilihat melalui mampu dan mandiri dalam hal keuangannya dan pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan sumber - sumber penerimaan asli daerah dengan cara penggalan, pemetaan dan pengenalan atas potensi yang ada di daerah tersebut. Keuntungan bagi daerah tersebut merupakan hasil pengelolaan potensi daerah oleh pemerintah daerah yang efektif dan sesuai sasaran, apabila suatu daerah kemandirian keuangan daerahnya tinggi hal ini bermakna ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat semakin. Akan tetapi, di dalam APBD Kota Banjarmasin tahun 2010-2019, pada posisi penerimaan pendapatan, dana perimbangan sangat mendominasi dibandingkan dengan PAD sendiri. Hal ini masih menunjukkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Banjarmasin terhadap Pemerintah Pusat selama 10 tahun berturut-turut. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan melaksanakannya dengan efektif dan efisien sehingga pertumbuhan ekonomi terdorong yang bisa menghasilkan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat daerahnya.

Menurut penjelasan diatas, permasalahan yang akan diangkat adalah : (1) Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin? (2) Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin? (3) Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin? (4) Bagaimana pengaruh

kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin?

Tujuan penelitian yaitu : (1) Mengetahui tingkat rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. (2) Mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin (3) Mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin (4) Mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar bisa mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri,

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang dan kekayaan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD yaitu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan yang dapat menjadi jaminan kerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya pada satu tahun anggaran (Kiflimansyah, 2001).

### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan uang yang didapat pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku melalui rekening kas umum daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana menjadi penambah ekuitas daerah tersebut.

### **Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah merupakan pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

### **Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah yaitu sebagai alat ukur apakah pemerintah daerah mampu tidaknya dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan suatu tanda daerah tersebut mampu melaksanakan otonomi daerahnya, yang berarti daerah tersebut diwajibkan memiliki kewenangan dan kemampuan dalam hal meningkatkan sumber potensi-potensi penerimaan keuangan daerah tersebut, mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerahnya.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah yaitu sebagai alat ukur apakah suatu daerah tersebut mampu dalam hal membiayai daerahnya seperti membiayai kegiatan pemerintahannya, pembangunannya serta pelayanannya terhadap masyarakat daerah tersebut.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal**

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Melalui perhitungan PDRB dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan PDRB agar menggambarkan produksi barang atau jasa suatu daerah untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi

Sistem desentralisasi fiskal merupakan sistem yang mana pemerintah daerah berperan sangat penting daripada peran pemerintah pusat dalam aspek penyediaan pelayanan publik atau masyarakat yang mana akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

**PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Pasar merupakan hasil dari nilai tambah bruto yang timbul dan merupakan hasil dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

**METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian yang diteliti adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya dengan PDRB perkapita. Jenis penelitian berupa penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif, data yang dipakai yaitu data sekunder. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan. Lokasi penelitian bertempat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

**Definisi Operasional Variabel**

***Kemampuan Keuangan Daerah***

Kemampuan keuangan daerah yaitu alat ukur apakah pemerintah daerah mampu tidaknya dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri

***Kemandirian Keuangan Daerah***

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah mandiri atau tidaknya dalam urusan membiayai kegiatan pemerintah daerahnya.

***PDRB Perkapita***

PDRB Perkapita merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

**TEKNIK ANALISIS DATA**

***Kemampuan Keuangan Daerah***

Kemampuan keuangan daerah / derajat desentralisasi fiskal (DDF) bisa diperoleh melalui rumus berikut :

- Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Pendapatan Umum Daerah = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum
- Belanja Pegawai = Belanja Gaji dan Tunjangan + Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kemampuan Keuangan Daerah untuk daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan Daerah	Kriteria
Dibawah Rp 300.000.000.000,-	Rendah
Rp 300.000.000.000,- sampai dengan Rp 550.000.000.000,-	Sedang
Diatas Rp 550.000.000.000,-	Tinggi

***Rasio Kemandirian Keuangan Daerah***

Rasio kemandirian keuangan daerah / derajat otonomi fiskal (DOF) bisa diperoleh melalui rumus berikut

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / DOF akan dilihat ke dalam kriteria di bawah ini :

**Tabel 3**  
**Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio (%)	Kriteria
< 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

**Regresi Linier Berganda Metode Ordinary Least Square (OLS)**

Metode yang dipakai agar mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan PDRB perkapita menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS. Berikut model yang digunakan :

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 DOF + ei$$

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)

DDF = Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (Rp)

DOF = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Fiskal (%)

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

$\beta_0$  = Konstanta

ei = Standar error

Untuk memperoleh regresi yang terbaik maka harus melakukan uji statistik yang terdiri dari uji t (parsial), uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Selanjutnya, dilakukan juga uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi dan uji normalitas.

**HASIL DAN ANALISIS**

**Kemampuan Keuangan Daerah**

**Tabel 4**  
**Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019**

Tahun	Pendapatan Umum Daerah (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	Kemampuan Keuangan Daerah (Rp)	Kriteria
2010	634,776,721,528.52	430,481,974,877.00	204,294,746,651.52	Rendah
2011	771,432,983,889.55	493,158,039,835.50	278,274,944,054.05	Rendah
2012	854,626,345,921.93	580,996,478,210.75	273,629,867,711.18	Rendah
2013	940,934,192,623.96	634,541,617,245.00	306,392,575,378.96	Sedang
2014	1,038,797,584,121.61	686,183,907,442.00	352,613,676,679.61	Sedang
2015	1,072,362,106,605.57	703,426,712,902.00	368,935,393,703.57	Sedang
2016	1,155,160,201,808.06	715,900,790,477.00	439,259,411,331.06	Sedang
2017	1,149,729,685,513.79	585,997,403,833.00	563,732,281,680.79	Tinggi

2018	1,143,215,333,361.90	589,787,245,076.00	553,428,088,285.90	Tinggi
2019	1,190,314,804,598.04	690,552,322,148.00	499,762,482,450.04	Sedang

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Banjarmasin dalam angka, data diolah

Bisa dilihat dari tabel 4 diatas untuk Kemampuan Keuangan daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2010 sampai dengan 2019 sebagai berikut : (1) Pada tahun 2010 Kemampuan Keuangan Daerah hanya sebesar Rp 204.294.746.651,52 saja yang mana kriterianya termasuk ke dalam kategori “rendah”. (2) Untuk tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp 278.274.944.054,05 tetapi kriterianya masih termasuk ke dalam kategori “rendah”. (3) Tahun 2012 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 273.629.867.711,18 tetapi masih dikriteria “rendah”. (4) Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang semakin bertambah yaitu menjadi sebesar Rp 306.392.575.378,96 , Rp 352.613.676.679,61 , Rp 368.935.393.703,57 dan Rp 439.259.411.331,06 15,11%, 16,11%, 16,27% dan 21,79% dan masuk ke dalam kriteria “sedang” (5) Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin masuk ke dalam kriteria “tinggi” karena mencapai sebesar Rp 563.732.281.60,79 dan Rp 553.428.088.285,90 (6) Lalu, di tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang mana hanya sebesar Rp 499.762.482.450,04 dan masuk ke dalam kriteria “sedang”.

Dapat diketahui dari tabel 4 untuk Kemampuan Keuangan Daerah/DDF Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi dengan yang terendah di tahun 2010 yaitu Rp 204.294.746.651,52 dan untuk yang tertinggi di tahun 2017 mencapai Rp 563.732.281.680,79 . Jika dilihat secara keseluruhan Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin dalam periode 2010—2019 masih dalam kategori sedang.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tabel 5

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Daerah (DOF) Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	Total PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat DOF
2010	80,510,647,970.52	59,009,967,355.00	13,64	Kurang
2011	118,554,981,542.55	644,770,302,347.00	18,39	Kurang
2012	138,086,121,906.93	758,384,384,015.00	18,21	Kurang
2013	167,313,762,016.96	820,574,580,607.00	20,39	Cukup
2014	216,427,691,789.61	842,336,752,332.00	25,69	Cukup
2015	226,660,182,755.57	848,197,803,850.00	26,72	Cukup
2016	247,258,423,246.06	1,113,815,696,695.00	22,20	Cukup
2017	322,086,167,527.79	992,961,481,745.00	32,44	Sedang
2018	277,873,887,439.90	1,028,151,940,256.00	27,03	Cukup
2019	330,579,799,537.04	1,043,449,970,105.00	31,68	Sedang

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Banjarmasin Dalam Angka, Data Diolah

Bisa dilihat dari tabel 5 diatas untuk Rasio Kemandirin Keuangan daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2010 sampai dengan 2019 memiliki rata-rata tingkat kemandirian yang tergolong cukup yang hanya mencapai 23,69%

***Analisis Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap PDRB Perkapita***

Alat analisis yang digunakan agar bisa mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (kemampuan dan kemandirian keuangan daerah) terhadap variabel dependen (PDRB perkapita) yaitu dengan analisis regresi linier berganda metode OLS.

**Tabel 6**

**PDRB Perkapita Atas Harga Konstan, DDF, Rasio DOF Kota Banjarmasin Tahun 2010 2019**

Tahun	PDRB (Rp)	DDF (Rp)	DOF (%)
2010	13,067,090,000	204,294,746,651.52	13.64
2011	13,740,230,000	278,274,944,054.04	18.39
2012	14,588,860,000	273,629,867,711.18	18.21
2013	15,600,540,000	306,392,575,378.96	20.39
2014	16,553,890,000	352,613,676,679.61	25.69
2015	17,511,610,000	368,935,393,703.57	26.72
2016	18,611,320,000	439,259,411,331.06	22.2
2017	19,801,580,000	563,732,281,680.79	32.44
2018	21,065,060,000	553,428,088,285.90	27.03
2019	22,353,310,000	499,762,482,450.04	31.68

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Data Diolah

Berikut hasil perhitungan dengan metode OLS :

**Tabel 7**

**Hasil Uji Ordinary Least Square**

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	1.94E+09	0.274303	0.7918
DDF	0.018707	2.932142	0.022
LOG(DOF)	2.61E+09	0.896847	0.3996
R-squared		0.899851	
Prob. (F-Statistic)		0.000318	

Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0

Berikut model yang diperoleh dari hasil regresi :

$$PDRB = 1,94 + 0,018 DDF + 2.61 DOF$$

Keterangan :

1. Nilai c = 1.39 artinya apabila tidak terjadinya perubahan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, maka PDRB akan meningkat sebesar 1.94.
2. Nilai DDF = 0.018 artinya apabila DDF mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan PDRB sebesar 0.018% dengan asumsi variabel lain tetap, begitupun sebaliknya.

3. Nilai LOG(DOF) = 2.61 artinya apabila rasio DOF mengalami kenaikan senilai 1% maka akan menaikkan PDRB senilai 2.618% dengan asumsi variabel lain tetap, begitupun sebaliknya.

**Uji Statistik**

**Uji Parsial / t**

**Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah / DDF (X<sub>1</sub>) terhadap PDRB Perkapita (Y)**

Berdasarkan tabel 7 variabel kemampuan keuangan daerah / DDF mempunyai nilai Prob 0.0220 , yang mana prob < 0.05 (0.0220 < 0.05), yang berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya, variabel kemampuan keuangan daerah / DDF berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB Perkapita.

**Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah / DOF (X<sub>2</sub>) terhadap PDRB Perkapita (Y)**

Berdasarkan tabel 7 variabel kemandirian keuangan daerah / DOF mempunyai nilai Prob 0.3996 , yang mana prob > 0.05 (0.3996 > 0.05), yang berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Artinya, variabel kemandirian keuangan daerah / DOF berpengaruh (positif) tidak signifikan terhadap PDRB Perkapita.

**Uji F**

Dilihat dari tabel 7, ditunjukkan nilai F = 0.000318 < 0.05 (yakni α = 5%) atau bahkan nilai probabilitas F = 0.000318 < 0.01 (yakni α = 1%).

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan tabel 7, nilai R<sup>2</sup> = 0.899851, hal ini menunjukkan bahwa 89% PDRB Perkapita di Kota Banjarmasin bisa dijelaskan dengan variabel kemampuan keuangan daerah / DDF dan kemandirian keuangan daerah / DOF, sedangkan 11% dijelaskan dengan variabel lain diluar model penelitian ini.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas akan menggunakan VIF (Variance Inflation Factors), yaitu sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Centered VIF
C	NA
DDF	4.480633
DOF	4.480633

Sumber : Eviews 10.0

Dari tabel diatas, bisa dilihat uji multikolinieritas bisa dilihat di kolom Centered VIF. Nilai VIF variabel DDF dan DOF yaitu 4.48 , yang mana tidak lebih besar dari 10 dan berarti kedua variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi akan memakai metode Breuch-Godfrey atau LM (Langrange Multiplier) Test yaitu sebagai berikut :



**Tabel 9**  
**Hasil Uji Breucch-Godfrey**

<i>F-statistic</i>	8.056414	<i>Prob. F(2,5)</i>	0.0273
<i>Obs*R-squared</i>	7.631772	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.0220

Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0

Prob. F(5,2) yaitu 0,0273. Apabila nilai Prob. F hitung lebih rendah dari nilai alpha yaitu 0,05 (5%) maka menurut uji hipotesis,  $H_0$  ditolak yang berarti terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas akan menggunakan metode Breuch-Pagan-Godfrey yaitu sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Hasil uji Breuch-Pagan-Godfrey**

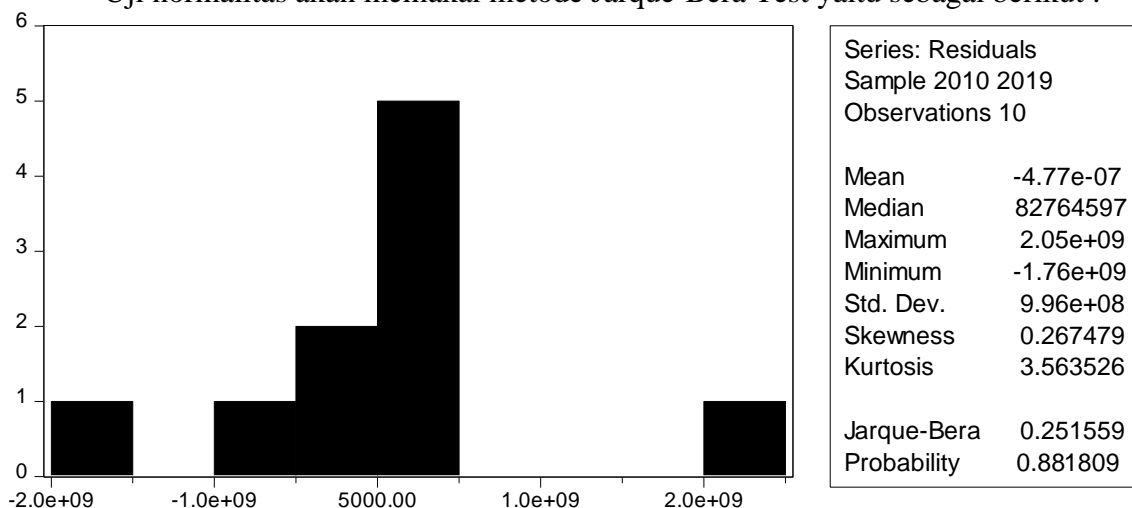
<i>F-statistic</i>	1.739491	<i>Prob. F(2,7)</i>	0.2436
<i>Obs*R-squared</i>	3.319962	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.1901
<i>Scaled explained SS</i>	2.085148	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.3525

Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0

Jika nilai Prob. F hitung  $> 0,05$  artinya  $H_0$  diterima. Dilihat dari tabel 10 diatas, nilai Prob. F hitung  $0,2436 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas akan memakai metode Jarque-Bera Test yaitu sebagai berikut :



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0

Jika Prob. JB Hitung  $> 0,05$  itu berarti residual terdistribusi normal dan begitupun sebaliknya. Bisa dilihat gambar diatas, Prob. JB hitung  $0,881809 > 0,05$  yang berarti

residual tersebut terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian ini adalah menemukan ada tidaknya pengaruh kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin terhadap PDRB Perkapita karena dilihat dari APBD Kota Banjarmasin dari sisi penerimaan PAD Kota Banjarmasin masih lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan diluar PAD.

### **Keterbatasan Penelitian**

Adanya perbedaan data PAD dari Badan Keuangan Daerah dengan data Pendapatan Asli Daerah dari Kementerian Keuangan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini yaitu : (1) Berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah / DDF Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 masih berada di kategori “sedang”, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 termasuk ke dalam kategori “cukup”. (2) Kemampuan keuangan daerah / DDF ( $X_1$ ) berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB perkapita. (3) Kemandirian keuangan daerah / DOF ( $X_2$ ) berpengaruh (positif) tidak signifikan terhadap PDRB perkapita. (4) Secara simultan, kemampuan dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB perkapita, yang mana nilai probabilitas sebesar  $0.000318 < 0.05$ .

## **Saran**

Saran-saran yang akan dikemukakan yaitu (1) Pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam menjalankan otonomi daerah diharapkan memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. (2) Pemerintah daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat dan membantu pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin.

## **BIBLIOGRAPHY**

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

BPS Kota Banjarmasin. Banjarmasin dalam Angka tahun 2010-2019.

Choiroel Woestho dkk. (2020). *Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto*. Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jalu Aji Prakoso dkk. (2019). *Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah*. Jawa Tengah : Universitas Tidar.

Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Makmuralto dkk. (2020). *Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Luwu Raya*. Makassar : Universitas Muslim Indonesia.

- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional*.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Oates, Wallace E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature*. Vol. 37.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Risyanto, Hilmi. (2015). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekeonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013*. Jawa Barat : Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Royda & Riana, Dwi (2019). *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*. Palembang : Universitas Tridinanti Palembang.
- Sholikhah, Ratna (2011). *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009*. Jawa Tengah : Universitas Sebelas Maret.
- Suci, Stannia Cahaya & Asmara, Alla (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.